

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional berperan penting dalam suatu negara. Tujuan dari pembangunan nasional yaitu meningkatkan laju perekonomian suatu negara agar dapat meningkatkan lapangan pekerjaan. Semakin banyak lapangan pekerjaan maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mampu mendorong terwujudnya pembangunan nasional dalam negara tersebut. Masalah terbesar dalam pembangunan nasional yaitu tingginya tingkat kemiskinan dalam negara.²

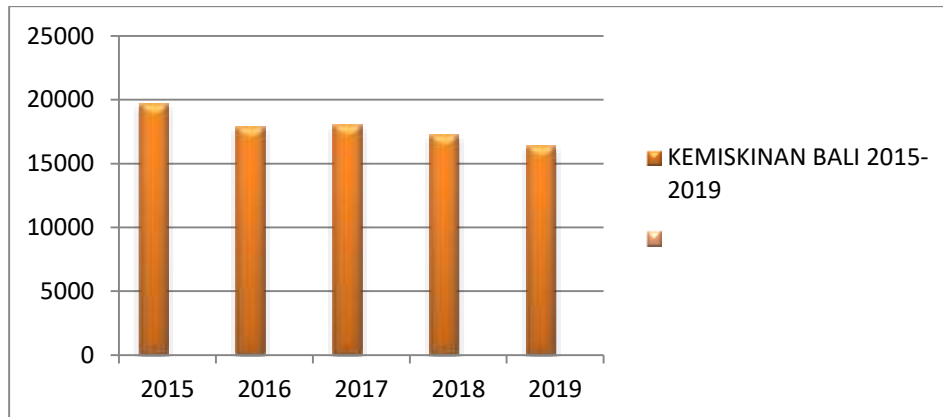
kemiskinan merupakan situasi dimana pendapatan tahunan individu di suatu kawasan tidak dapat memenuhi standart pengeluaran minimum yang dibutuhkan individu untuk hidup layak di kawasan tersebut. Individu yang hidup dibawah standart pengeluaran tersebut tergolong miskin. Ketika perkembangan perekonomian berkembang di suatu kawasan (negara atau kawasan yang lebih kecil), terdapat lebih banyak pendapatan untuk dibelanjakan, yang jika terdistribusi dengan baik diantara penduduk kawasan tersebut akan mengurangi kemiskinan. Dengan kata lain, secara teoritis ekonomi memerankan peranan penting dalam mengatasi penurunan kemiskinan.³

² Mudrajat Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta : Salemba Empat, 2006), hal.18

³ Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti, "Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol.2, No.8, Juni 2008, hal.25

Gambar 1.1

Kemiskinan Provinsi Bali Tahun 2015 – 2019 (Ribuan Jiwa)



Data yang telah diolah, sumber BPS⁴

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan yang terjadi di provinsi Bali tahun 2015 sampai 2019 mengalami penurunan. Menurunnya tingkat kemiskinan di provinsi Bali menunjukkan bahwa masyarakat Bali telah meningkatnya kesejahteraan masyarakat Bali pada tahun 2015 sampai tahun 2019. Dari tahun 2015 jumlah penduduk miskin mencapai 196,71 ribu orang (4,74%), tahun 2016 jumlah penduduk miskin mencapai 178,18 ribu orang (4,25%), tahun 2017 jumlah penduduk miskin mencapai 180,13 ribu orang (4,25%), tahun 2018 jumlah penduduk miskin mencapai 171,76 ribu orang (4,01%), dan pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin mencapai 163,85 ribu orang (3,79%).

Kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan meningkatnya laju perekonomian dibuktikan dengan bertambahnya barang dan jasa yang dihasilkan

⁴ Badan Pusat Statistika : <http://bali.bps.go.id>, diakses Pada 28 Mei 2021

oleh suatu Negara. Bertambah barang dan jasa dalam negara bergantung pada tinggi rendahnya produksi yang dilakukan oleh masyarakat dalam negara tersebut.

Semakin tinggi produksi yang dilakukan masyarakat maka barang dan jasa yang dihasilkan akan meningkat.⁵ Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah makro dalam suatu negara. Semakin banyak dan berkualitas barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara menentukan besar kecilnya investasi yang dilakukan oleh investor baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Besar kecilnya investor yang berinvestasi juga mempengaruhi *income* negara, semakin banyak investasi yang dilakukan oleh investor dalam negara semakin meningkatnya *income* dalam negara tersebut, begitupun sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan kapasitas perekonomian, menciptakan lapangan kerja yang baru, meningkatkan pendapatan perkapita, menaikkan permintaan dan penawaran mengikuti mekanisme perekonomian.⁶

Pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang merupakan motor utama untuk meningkatkan standart hidup secara umum. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan akan tetapi apabila pertumbuhan ekonomi yang tidak merata pertumbuhan ekonomi tidak dapat mengatasi kemiskinan.⁷ Pertumbuhan ekonomi per kapita merupakan suatu indikator yang dihitung dengan cara membagi data pertumbuhan ekonomi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Hal ini bertujuan untuk memberikan

⁵ Sadono Sukirno, *Pengantar Ekonomi Makro Ekonomi, Edisi Kedua*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 10

⁶ Rahardjo Adisasmita, *Teori – Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), hal. 4

⁷ Erik Prahara, “*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan dan Pengangguran di Provinsi Jambi*”, (Jambi : Skripsi Universitas Islam Negeri Jambi, 2002), hal. 17

gambaran – gambaran tentang seberapa besar nilai tambah yang diciptakan / diterima tiap – tiap penduduk, sehingga secara tidak langsung akan menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di daerah / wilayah bersangkutan. Semakin besar nilai pertumbuhan ekonomi per kapita, maka dapat dikatakan suatu daerah / wilayah semakin sejahtera. Pertumbuhan ekonomi per kapita merupakan angka agregat (rata – rata), sehingga masih sangat kasar jika dijadikan cermin tingkat kesejahteraan penduduk.⁸

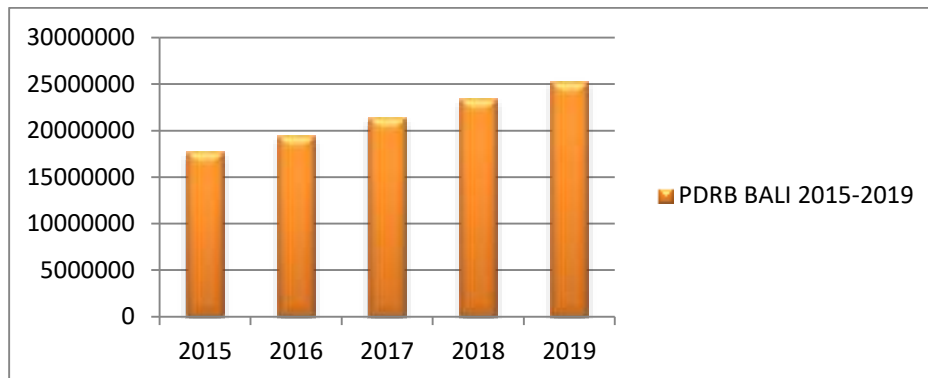
Menurut Tambunan, pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan mengurangi kemiskinan. Ada suatu korelasi menemukan bahwa terdapat hubungan yang negative antara pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan. Hubungan ini menunjukkan bahwa pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan angka kemiskinan. Ada korelasi menemukan bahwa terdapat hubungan yang negative antara pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Hubungan ini menunjukkan pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Dengan demikian juga dengan hukum Okun's yang menyatakan bahwa adanya hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Dengan artian jika pertumbuhan ekonomi naik maka pengangguran akan menurun.⁹

⁸ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, (Jakarta : Kencana, 2006), hal. 9

⁹ Ahmad Ma'ruf dan Latri Wihastuti, "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia : Determinan dan prospeknya", *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol.9, No.1, April 2008, hal. 44-45

Gambar 1.2

Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali Tahun 2015 – 2019 (Milyar Rupiah)



Data yang diolah, sumber BPS¹⁰

Dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di kabupaten / kota di Provinsi Bali tahun 2015 – 2019 mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 mencapai Rp. 76.412,67 milyar (68.48%), tahun 2016 mencapai Rp. 194.089,58 milyar (68.76%), tahun 2017 mencapai Rp. 213.035,86 milyar (69.48%), tahun 2018 mencapai Rp. 233.636,77 milyar (69.54%) dan pada tahun 2019 mencapai Rp. 252.138,88 milyar (69.61%). Namun demikian pertumbuhan ekonomi per kapita masih berada di bawah angka rata – rata nasional. Hal ini harus menjadi perhatian yang serius oleh semua *stakeholder* untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi per kapita penduduk Bali.

Nilai tambah yang tercipta di Bali termasuk dalam kategori cukup besar untuk provinsi kecil yang tidak memiliki sumberdaya alam dan migas. Jika dilihat dari segi perbandingan capaian pertumbuhan ekonomi sebagaimana tertuang dalam RPJMD semesta berencana Bali tahun 2018 – 2013 dengan posisi (7,0% - 7,5%),

¹⁰Badan Pusat Statistika : <http://bali.bps.go.id>, diakses Pada 31 Mei 2021

pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2018 masih belum mencapai target karena merupakan tahun awal RPJMD semesta berencana Bali baru menyentuh 6,35%.begitu juga dengan tahun 2019 dimana pertumbuhan ekonomi Bali belum mencapai target. Target pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2019 adalah 6,4%, sedangkan riil adalah 5,63%. Tidak tercapainya target perekonomian Bali bukan berarti mencerminkan perekonomian Bali yang tidak baik. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi provinsi Bali walaupun target tidak tercapai namun pertumbuhan ekonomi Bali masih tumbuh diatas rata – rata nasional.

Struktur perekonomian provinsi Bali masih ditunjang oleh sektor tersier (pariwisata). Hal tersebut terlihat dari kategori yang berkontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB yaitu kategori penyediaan akomodasi makan dan minum. Distribusi PDRB atas harga berlaku pada tahun 2019 tidak mengalami perbedaan dari tahun – tahun sebelumnya, yaitu sektor primer 14,40%, sektor skunder 16,06% dan sektor tersier 69,54%. Angka – angka tersebut menunjukkan bahwa sektor primer (pertanian) dan sektor skunder (industri) cenderung seimbang, tetapi tidak halnya dengan sektor tersier yang cenderung dominan. Untuk mengantisipasi terjadinya gangguan pertumbuhan PDRB yang terfokus pada sektor tersier (jasa pariwisata) maka dilakukan perimbangan khususnya sektor primer dengan memberi perhatian lebih banyak pada sektor pertanian dan sektor skunder (industri) untuk menjaga kestabilan PDRB. Melihat kondisi tersebut maka perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan target baru.

Segmentasi wilayah sektor tersier ini berada di wilayah Bali bagian selatan atau biasa disebut “Sarbagita” (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan), karena

wilayah tersebut terkonsentrasi aktivitas ekonomi pendukung wisata seperti : hotel, villa, agen, dan biro perjalanan wisata, restaurant, rumah makan, café dsb.

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi kemiskinan yaitu Investasi. Investasi merupakan penanaman modal atau dana yang dilakukan oleh perseorangan maupun perusahaan dalam jangka panjang yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi.¹¹ Suatu negara maupun daerah untuk meningkatkan produksinya membutuhkan modal, dimana modal tersebut diolah dalam usaha ataupun produksi yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang akan menghasilkan barang dan jasa sehingga dapat didistribusikan untuk menghasilkan nilai ekonomis dan menghasilkan keuntungan. Semakin banyak investasi yang dilakukan oleh seseorang ataupun perusahaan maka semakin meningkat produksi yang dilakukan sehingga dapat meningkatkan tenaga kerja serta mengurangi terjadinya pengangguran membuat angka kemiskinan menurun.¹²

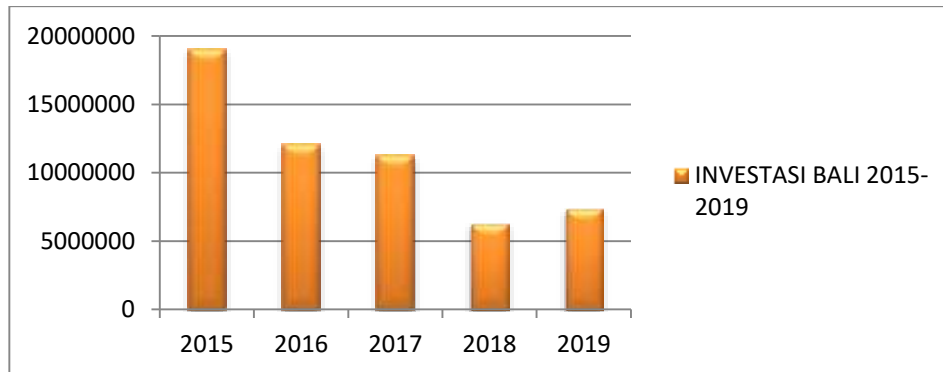
Investasi juga penting bagi suatu wilayah untuk memaksimalkan output, tetapi untuk menentukan distribusi tenaga kerja dan distribusi pendapatan, pertumbuhan dan kualitas penduduk serta teknologi. Tingkat investasi yang tinggi akan meningkatkan kapasitas produksi yang pada akhirnya berujung pada pembukaan lapangan kerja baru. Adanya investasi juga memungkinkan terjadinya transfer teknologi dan pengetahuan dari Negara maju ke Negara berkembang.¹³

¹¹ Nor Hadi, *Pasar Modal : Acuan Teoritis dan Praktis Investasi di Instrumen Keuangan Pasar Modal, Edisi Pertama*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), hal.3

¹² Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 121

¹³ Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia, Tinjauan Historis, Teoritis dan Empiris*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014), hal. 164

Gambar 1.3
Investasi Provinsi Bali (Juta Rupiah)



Data yang diolah, sumber BPS¹⁴

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa investasi yang terjadi di provinsi Bali pada tahun 2015 – 2019 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2015 mencapai Rp. 19.007.670, tahun 2016 mencapai Rp. 12.057.640, tahun 2017 mencapai Rp. 11.267.739, tahun 2018 mencapai Rp. 16.293.534 dan pada tahun 2019 mencapai Rp. 7.393.172. Pada tahun 2018 pada provinsi Bali mengalami penurunan drastis dari tahun sebelumnya dan mengalami kenaikan lagi pada tahun setelahnya pada tahun 2019. Sektor wisata merupakan sektor dominan dalam investasi di provinsi Bali tahun 2015 – 2019. Sedangkan pada tahun 2015 – 2018 investasi provinsi Bali mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal tersebut karena keadaan politik di provinsi Bali yang kurang kondusif sehingga investor menurun karena takut penanaman modal untuk jangka panjangnya tidak berkembang dengan baik serta tidak menghasilkan profit atau keuntungan. Namun pada tahun 2019 investasi mulai mengalami kenaikan.

¹⁴Badan Pusat Statistika : <http://bali.bps.go.id>, diakses Pada 30 Mei 2021

Pengangguran merupakan angkatan kerja yang belum bekerja dan masih mencari kerja. Pengangguran salah satu penyebab terjadinya kemiskinan. Pengangguran disebabkan karena beberapa hal antara lain rendahnya lapangan pekerjaan, rendahnya pendidikan, tingginya persaingan sedangkan kualitas dalam diri masih minim, dll.¹⁵ Pengangguran merupakan masalah ketenagakerjaan yang dialami banyak Negara. Begitu seriusnya masalah ini pengangguran harus segera diatasi karena menjadi penyebab terjadinya kemiskinan baik dari kesadaran tiap individu maupun peran pemerintah. Semakin rendah pengangguran maka semakin meningkat kesejahteraan masyarakat maka kemiskinan bisa teratasi dengan baik.¹⁶

Pengangguran juga terjadi karena adanya kesenjangan antara penyedia lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja yang mencari pekerjaan. Pengangguran bisa juga terjadi meskipun jumlah kesempatan kerja tinggi akan tetapi terbatasnya informasi, perbedaan dasar keahlian yang tersedia dari yang dibutuhkan atau bahkan dengan sengaja memilih untuk menganggur. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat membawa berbagai dampak pada proses pembangunan ekonomi. Agar tidak terus berkelanjutan, pemerintah harus mengatasi masalah pengangguran. Karena pengangguran merupakan masalah yang sangat vital bagi kestabilan perekonomian suatu wilayah.¹⁷ Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan pengangguran yang ada di suatu negara yang sedang berkembang menjadi semakin serius. Tingkat

¹⁵ G. Mankiw, *Makroekonomi*, (Jakarta : Erlangga, 2006), hal. 154

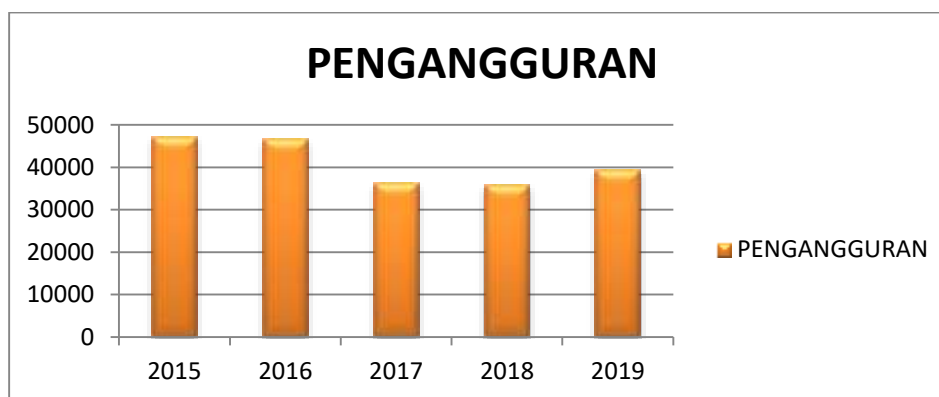
¹⁶ Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia Tinjauan Histori, Teoritis dan Empiris*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014), hal. 110

¹⁷ Ratih Probosiwi, "Pengangguran dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kemiskinan", *Jurnal PKS, Vol.15.No.2*, Juni 2016, hal. 89-100

pengangguran terbuka sekarang yang ada di Indonesia rata – rata sekitar 10 persen dari seluruh angkatan kerja diperkotaan.¹⁸

Gambar 1.4

Pengangguran Provinsi Bali (Ribuan Jiwa)



Data yang diolah, sumber BPS¹⁹

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa pengangguran yang terjadi di provinsi Bali tahun 2015 – 2019 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2015 mencapai 47.210 jiwa orang (1.99%), tahun 2016 mencapai 46.484 jiwa orang(1.89%), tahun 2017 mencapai 36.143 jiwa orang(1.48%), tahun 2018 mencapai 35.811 jiwa orang (1.40%) dan pada tahun 2019 mencapai Rp. 39.288 jiwa orang (1.57%). Pada tahun 2015 – 2018 mengalami penurunan. Penurunan pengangguran secara signifikan pada tahun 2017 dan 2018 kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan lagi. Hal tersebut disebabkan karena jumlah tenaga kerja pada masyarakat Bali tidak terserap secara merata karena sebagian masyarakat Bali tidak hanya bekerja di sektor wisata. Sedangkan sektor wisata lebih dominan pada investasi dan pertumbuhan ekonomi.

¹⁸ World Bank, *Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, (Jakarta : The World Bank, 2005), hal. 57

¹⁹ Badan Pusat Statistika : <http://bali.bps.go.id>, diakses Pada 30 Mei 2021

Berdasarkan latar belakang di atas provinsi Bali berada dibawah rata – rata nasional dan menduduki peringkat kedua dengan jumlah penduduk miskin terendah secara nasional setelah DKI Jakarta. Dimana provinsi Bali merupakan provinsi yang sangat terkenal dimata pariwisata dunia, dengan pemandangan alam yang indah serta kental akan corak budaya religious dan nilai luhurnya. Selain itu Bali juga terkenal akan adat dan kebudayaan yang sudah ada zaman dahulu dan menjadi warisan budaya. Seperti contohnya yaitu di provinsi Bali terdapat desa Panglipuran yang berada di kabupaten Bangli, dimana dalam desa ini masyarakatnya masih tradisional sangat mematuhi peraturan adat bukan berarti menolak modernisasi akan tetapi melestarikan adat dan budaya daerah setempat agar tidak luntur akan perkembangan jaman. Sebagian besar masyarakatnya percaya adanya kuasa dewa dalam kehidupannya. Mereka menyerahkan semua hidupnya kepada dewa, sehingga dalam kehidupannya tidak mementingkan akan tingkat pendapatan, pendidikan, dsb. Tingkat kesejahteraan ditentukan oleh kuasa dewa. Di desa ini dilihat dari arsitektur bangunan rumah, semua bangunan rumah masyarakat desa Panglipuran memiliki arsitektur bangunan yang sama pada bagian depannya, halaman sebelah kanan ada pura dan rumah bagian dalam ada balai bengong, bahkan di desa ini aliran listrik tidak ada. Serta keunikan desa ini dilarang kendaraan bermotor masuk kawasan tersebut. Hal tersebut tidak menjadikan masyarakatnya tidak bisa mencapai kesejahteraan hidup akan tetapi dengan adanya kepercayaan akan kuasa dewa mereka bisa hidup sejahtera dengan kehidupan yang cukup dan kondisi kehidupan yang masih sederhana dan tradisional. Selain itu ada desa Tenganan yang terletak di Kabupaten Karangasem, masyarakatnya sangat

memegang teguh aturan adat dari leluhur yang disebut awig – awig, larangan berpoligami ataupun bercerai, di desa ini juga masyarakatnya meningkatkan ketrampilan dengan alat – alat yang masih sederhana dan ajaran – ajaran tradisional yang telah diajarkan oleh nenek moyang jaman dahulu misalnya membuat kain tenun geringsing, kerajinan ukir, kerajinan lukis daun lontar, adapun pelaksanaan upacara adat yang digelar pada bulan – bulan tertentu yaitu pada bulan januari, februari, juni dan desember. Dilihat dari kehidupan masyarakat Bali yang masih tradisional bukan berarti masyarakat setempat menolak modernisasi. Di desa Tenganan masih terdapat listrik, transportasi dan alat komunikasi. Adapun desa Trunyan yang terletak di tepi danau kabupaten Bangli, dimana di desa ini terkenal dengan prosesi pemakaman jenazah. Selain daerahnya indah akan pariwisatanya karena tempatnya dekat dengan danau dan suasana desa masih asri akan tetapi masyarakat lebih mengutamakan melestarikan adat setempat daripada mengembangkan pariwisata dengan menyediakan tanah yang sangat luas untuk proses pemakaman jenazah. Adat Prosesi pemakaman jenazah didaerah ini dengan membaringkan jenazah di atas tanah dibawah pohon taru menyan. Meskipun jenazah tidak dimakamkan, akan tetapi jenazah tidak akan berbau busuk karena masyarakat meyakini bahwa pohon taru menyan memiliki aroma tersendiri sehingga mampu menetralkan aroma busuk disekitarnya. Jika dilihat dari segi perekonomian ada ketimpangan antara masyarakat Bali kota dengan masyarakat Bali pedesaan (desa adat). Kemiskinan masyarakat Bali di perkotaan mengalami tingkat kemiskinan yang tinggi karena taraf kehidupan masyarakat masih diukur dengan tingkat pendapatan, pendidikan, jenis pekerjaan dsb, sedangkan kemiskinan masyarakat

Bali di pedesaan mengalami tingkat kemiskinan yang rendah karena tingkat kesejahteraan kehidupan mereka tergantung pada kuasa dewa. Serta mereka mudah mendapatkan pekerjaan melalui keterampilan yang telah diasah dan dipelajari dari adat daerah mereka untuk dijadikan sebagai sumber mencari rejeki. Maka dari itu provinsi Bali dikenal sebagai Pariwisata budaya yang memiliki daya tarik wisatawan dan kental akan nilai religiusnya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di provinsi Bali.

Dengan kekayaan akan budaya dan pariwisata, provinsi Bali masih menghadapi masalah sosial terkait kemiskinan. Indikator masyarakat Bali dikatakan sebagai penduduk miskin yaitu :

1. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah

Tabel 1.1

Tingkat Pendidikan Masyarakat di Provinsi Bali (Persentase)

No	Jenjang Pendidikan	Tingkat Pendidikan Penduduk di Provinsi Bali (Persen)				
		Laki-Laki + Perempuan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	SD	95,64	95,75	96,09	96,19	96,78
2	SLTP	84,78	84,99	85,32	86,00	86,75
3	SLTA	71,53	71,71	72,40	73,00	72,93
4	Perguruan Tinggi	21,61	21,80	22,78	24,06	24,17

Data yang diolah, sumber BPS²⁰

Berdasarkan data yang berasal dari BPS provinsi Bali, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di provinsi Bali masih tergolong rendah. Dilihat dari jumlah masyarakat yang berpendidikan tinggi di perguruan tinggi memiliki presentase yang lebih rendah daripada presentase tingkat pendidikan yang lain.

²⁰ Badan Pusat Statistika : <http://bali.bps.go.id>, diakses Pada 29 Juni 2021

Pada tahun 2015 – 2019 tingkat pendidikan di provinsi Bali sebagian besar masyarakatnya pendidikan terakhirnya yaitu SD. Tingkat pendidikan yang rendah tersebut yang menyebabkan masyarakat Bali dikatakan sebagai penduduk miskin. Karena tingkat pendidikan akan mempengaruhi SDM masyarakat yang dapat berdampak pada ketatnya persaingan dunia kerja. Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi persaingan dalam dunia kerja sangat ketat, kualitas SDM harus bisa mengimbangi dengan meningkatkan keahlian. Semakin tinggi pendidikan akan meningkatkan kualitas SDM sehingga dapat menciptakan keahlian yang dapat digunakan untuk mempersiapkan diri dalam dunia kerja. Sehingga menanggulangi terjadinya pengangguran dan meningkatnya kemiskinan.

2. Tingkat kesehatan yang tidak memadai

Tabel 1.2

**Jumlah Penduduk Yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan
(Persentase)**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan (Persentase)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kab. Jembrana	66.78	70.56	50.40	63.98	73.11
2	Kab. Tabanan	75.09	74.29	65.44	64.31	73.52
3	Kab. Badung	66.04	54.06	53.81	60.88	51.22
4	Kab. Gianyar	74.27	68.24	70.33	65.57	73.60
5	Kab. Klungkung	73.47	70.75	51.00	67.02	79.77
6	Kab. Bangli	72.30	75.04	68.67	69.37	68.82
7	Kab. Karangasem	70.28	65.07	64.77	70.11	76.02
8	Kab. Buleleng	63.35	71.43	54.77	63.33	70.77
9	Kota Denpasar	53.62	48.91	51.15	51.53	56.63
Provinsi Bali		66.30	65.00	58.85	62.77	67.69

Data yang diolah, sumber BPS²¹

²¹ Badan Pusat Statistika : <http://bali.bps.go.id>, diakses Pada 29 Juni 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat kesehatan masyarakat Bali yang tidak memadai dilihat dari tingginya presentase jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan tahun 2015 - 2019. Sebagian besar masyarakat Bali masih mempercayai akan ramuan – ramuan

Tradisional dari nenek moyang yang dipercaya sebagai obat untuk meningkatkan imunitas tubuh. Alasan masyarakat yang memilih untuk berobat jalan yaitu 58% tidak punya biaya berobat, 39% tidak ada biaya transport, 2% waktu tunggu pelayanan yang lama, dan 1% merasa tidak diperlukan. Hal tersebut masyarakat Bali dikatakan sebagai penduduk miskin.

3. Tingkat pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 1.3

Jumlah Pengangguran Berdasarkan Pendidikan (Presentase)

No	Pendidikan Tinggi Yang Ditamatkan	Jumlah Pengangguran Berdasarkan Pendidikan (Presentase)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	SD	16.58	5.61	12.58	10.87	9.59
2	SMP	5.64	5.14	13.15	17.92	16.58
3	SMA	28.6	23.58	25.45	21.84	28.76
4	Diploma I/II/III	12.66	10.49	5.45	9.02	13.02
5	Universitas	14.65	25.9	18.88	15.3	16.51
Total		78.13	70.72	75.51	74.95	84.46

Data yang diolah, sumber BPS²²

Dilihat dari data BPS terkait presentase pengangguran berdasarkan pendidikan menyatakan bahwa tingkat presentase pengangguran tertinggi pada tahun 2015 – 2019 pada masyarakat dengan tamatan pendidikan rendah SMA. Apabila tingkat pendidikan rendah maka kualitas SDM juga rendah sehingga tidak

²² Badan Pusat Statistika : <http://bali.bps.go.id>, diakses Pada 29 Juni 2021

bisa mengimbangi dengan ketatnya persaingan di dunia kerja maka dari itu dapat terjadinya pengangguran. Sehingga masyarakat Bali dikatakan sebagai penduduk miskin.

4. Luas lantai per kapita m²

Tabel 1.4

Jumlah Penduduk Yang Memiliki Luas Lantai Per Kapita M² (Persentase)

No	Luas Lantai Per Kapita M ²	2015	2016	2017	2018	2019
1	≤ 7.2	32.67	34.54	35.68	36.18	36.64
2	7.3 - 9.9	9.48	12.18	11.55	9.87	9.45
3	≥ 10	79.07	75.98	75.66	78.69	80.58

Data yang diolah, sumber BPS²³

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa luas lantai per kapita sebagian besar masyarakat di provinsi Bali memiliki luas lantai ≥ 10 m² per kapita. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingginya harga rumah maupun properti rumah tersebut. Akan tetapi presentase masyarakat dengan luas lantai per kapita ≤ 7.2 m² juga tergolong tinggi karena mahalnya harga tanah dan properti sehingga masyarakat memilih untuk membeli rumah yang tidak terlalu besar sesuai dengan kemampuan ekonomi yang dimilikinya. Luas lantai dengan ukuran ≤ 7.2 m² tergolong masyarakat miskin di provinsi Bali.

²³ Badan Pusat Statistika : <http://bali.bps.go.id>, diakses Pada 29 Juni 2021

5. Kepemilikan rumah

Tabel 1.5

Status Kepemilikan Rumah (Persentase)

No	Status Kepemilikan (%)	2015	2016	2017	2018	2019
1	Milik Sendiri	77.31	74.05	70.54	71.75	72.88
2	Kontrak / Sewa	43.65	39.43	36.2	35.45	37.89
3	Beban Sewa	4.7	5.81	7.29	7.98	5.73
4	Dinas	0.74	0.44	0.74	0.28	0.37
5	Lainnya	0.15	0.00	0.04	0.00	0.00

Data yang diolah, sumber BPS²⁴

Berdasarkan data BPS terkait status kepemilikan rumah menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di provinsi Bali mempunyai rumah sendiri. Akan tetapi presentase kontrak / sewa rumah masih tergolong tinggi. Karena banyak penduduk yang berpenghasilan rendah tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya termasuk untuk membeli rumah. Hal tersebut masyarakat Bali dikatakan sebagai penduduk miskin.

6. Kondisi rumah berdasarkan jenis tembok

Tabel 1.6

Jumlah Rumah Penduduk Berdasarkan Jenis Tembok (Persentase)

No	Jenis Tembok (%)	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tembok	96.4	97.18	97.48	96.73	97.39
2	Plesteran Anyaman Bambu / Kawat	0.21	0.48	0.07	0.09	0.52
3	Kayu / Papan	0.97	0.89	0.98	1.69	0.9
4	Anyaman Bambu	27.89	29.19	30.14	30.54	30.28
5	Bambu	0.3	0.17	0.09	0.26	0.12
6	Lainnya	0.38	0.04	0.08	0.07	0.02

Data yang diolah, sumber BPS²⁵

²⁴ Badan Pusat Statistika : <http://bali.bps.go.id>, diakses pada 29 Juni 2021

²⁵ Badan Pusat Statistika : <http://bali.bps.go.id>, diakses pada 29 Juni 2021

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa dinding rumah masyarakat Bali sebagian besar sudah terbuat dari tembok. Akan tetapi dilihat dari presentase yang mempunyai dinding terbuat dari anyaman bambu juga masih tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyaknya masyarakat miskin dengan kondisi rumah yang kurang layak jika dilihat dari arsitektur bangunan rumah banyak rumah penduduk yang temboknya masih terbuat dari anyaman bambu.

Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti faktor – faktor yang menyebabkan kemiskinan di provinsi Bali apakah disebabkan oleh rendahnya pertumbuhan ekonomi, rendahnya investasi, dan tingginya pengangguran ataupun faktor yang lainnya. Maka dari itu penulis mengambil judul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali Pada Tahun 2015 - 2019.”

B. Identifikasi Masalah

Dilihat dari latar belakang diatas, maka peneliti akan mengklarifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mengatasi kemiskinan di provinsi Bali karena pertumbuhan ekonomi di provinsi Bali belum merata. Masih banyaknya masyarakat yang berpendidikan rendah, tingkat kesehatan yang kurang memadai, kondisi lingkungan masyarakat yang kurang layak sehingga dapat mempengaruhi kualitas SDM untuk menghasilkan barang dan jasa dalam meningkatkan perekonomian suatu wilayah.
2. Investasi juga tidak bisa mengatasi kemiskinan di provinsi Bali karena investasi yang terjadi hanya untuk kalangan menengah ke atas.

3. Pengangguran di provinsi Bali juga masih tinggi karena banyaknya masyarakat Bali yang beralih bekerja dari bekerja formal ke informal sehingga tidak tercatat sebagai tenaga kerja.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2015 - 2019?
2. Apakah Investasi berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2015 - 2019?
3. Apakah Pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi Bali tahun 2015 – 2019?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2015 - 2019.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh investasi terhadap kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2015 - 2019.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2015 - 2019.

E. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya tujuan penelitian diatas diharapkan bisa menambah wawasan serta dapat bermanfaat bagi ilmuwan ekonom, pemerintah, lembaga akademik, serta peneliti yang akan datang. Adapun beberapa manfaat yang bisa diambil dari hasil penelitian tersebut antara lain yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Berdasarkan teori, hasil penelitian tersebut dapat digunakan oleh ilmuwan ekonom atau pakar ekonom atau para ahli ekonom untuk mengembangkan penelitian – penelitian yang berhubungan dengan variabel tersebut yang berkaitan dengan masalah pertumbuhan ekonomi, investasi, pengangguran maupun kemiskinan di Provinsi Bali.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat digunakan oleh pemerintah Bali dalam melaksanakan tugasnya dalam mengembangkan wilayahnya, sebagai tolak ukur kinerja pemerintah, serta pemerintah dapat memperbaiki kinerja dan menentukan strategi yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada di wilayahnya terutama Provinsi Bali.

b. Bagi Lembaga Akademik

Berdasarkan tambahan informasi dan sumbangan akademik yang berguna bagi perpustakaan IAIN Tulungagung untuk menjadi referensi tambahan mengenai kemiskinan dan juga diharapkan badan akademik bisa mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel – variabel lain

yang menyebabkan kemiskinan serta bisa menyumbang pemikiran perekonomian terutama di dalam bidang ekonomi makro.

c. Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Hasil penelitian ini, diharapkan bisa untuk tambahan wawasan, pengetahuan dan keterangan bagi para peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai masalah kemiskinan dengan memperkenalkan variabel predictor lain yang turut memengaruhi terjadinya kemiskinan.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

a. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tiga variabel bebas

X_1 = pertumbuhan ekonomi, X_2 = Investasi, X_3 = pengangguran.

2. Satu variabel terikat

Y adalah Kemiskinan.

b. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel bebas dan satu variabel terikat.

Data yang diambil dalam penelitian tersebut bersumber dari web resmi BPS (Badan Pusat Statistika) Provinsi Bali.

c. Yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu jumlah masyarakat miskin yang ada di Provinsi Bali pada tahun 2015 sampai dengan 2019.

2. Keterbatasan Penelitian

a. Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis hanya membahas beberapa variabel yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Bali antara lain pengaruh pertumbuhan ekonomi, Investasi dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Sebenarnya banyak yang menyebabkan terjadinya kemiskinan

di Provinsi Bali antara lain tingkat UMR, tingkat pendidikan masyarakat, rendahnya lapangan kerja, pendapatan yang tidak merata dsb. Serta penulis membatasi untuk periode penelitian diambil dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

- b. Sumber data dalam penelitian ini yaitu dari web resmi BPS (Badan Pusat Statistika) Provinsi Bali pada tahun 2015 sampai 2019. Data yang saya gunakan pada periode 5 tahun agar penelitian saya tidak terlalu luas.

G. Penegasan Istilah

a. Definisi Konseptual

1. Pertumbuhan Ekonomi yaitu perubahan meningkatnya perekonomian karena terjadinya peningkatan akan barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu.²⁶
2. Investasi yaitu penanaman modal atau dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan maupun perseorangan dalam jangka panjang yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi.²⁷
3. Pengangguran merupakan angkatan kerja belum bekerja dan masih mencari kerja yang disebabkan tidak ada lapangan pekerjaan yang tersedia atau lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan latar belakang pendidikan yang dimiliki.²⁸
4. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (makanan, pakaian, tempat tinggal) dalam

²⁶ Jolyne Myrell Parera, *Aglomerasi Perekonomian di Indonesia*, (Purwokerto :CV. IRDH, 2018), hal.12

²⁷ Achmad Daengs, *Pembangunan Ekonomi Jawa Timur Bebas Investasi*, (Surabaya : UNITOMO PRESS, 2020), hal.76

²⁸ Alam S, *Ekonomi Jilid 2 Untuk SMA dan MAN Kelas X*, (Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama, 2016), hal.6

hidupnya yang disebabkan karena kelangkaan kebutuhan pokok atau sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.²⁹

b. Penegasan Secara Operasional

Dari definisi konseptual diatas dapat disimpulkan bahwa secara operasional penelitian yang berjudul “Ánalisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali Tahun 2015–2019” merupakan sebuah penelitian yang menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi dan pengangguran terhadap kemiskinan di provinsi Bali tahun 2015–2019. Adapun yang menjadi indikatornya sebagai berikut:

- a. Pengangguran adalah ketidakseimbangan antara jumlah lapangan kerja dengan jumlah orang mencari kerja. Indikator tingkat pengangguran yaitu perbandingan antara jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah angkatan penduduk yang mencari kerja.
- b. Pertumbuhan Ekonomi adalah meningkatnya kegiatan ekonomi atas kebutuhan barang dan jasa. Indikator pertumbuhan ekonomi yaitu Produk Nasional Bruto (*Gross National Product*) dan Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Product*).
- c. Investasi adalah menanam modal yang dilakukan oleh perseorangan atau perusahaan yang bertujuan untuk mendapat keuntungan masa yang akan datang. Salah satu parameter yang digunakan dalam investasi yaitu PMTB

²⁹Yarlina Yacoub, “Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat”, *ISSN, Vol. 8, No.3*, Juni 2012, hal. 177

(Pembentukan Modal Tetap Bruto) yang menunjukkan penambahan dan pengurangan asset tetap pada suatu unit produksi.

- d. Kemiskinan yaitu sejumlah penduduk yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Kemiskinan memiliki beberapa indikator antara lain kesejahteraan masyarakat, kesenjangan pendapatan, kesenjangan pengeluaran, langkanya alat pelengkap kebutuhan dasar.

H. Sistematika Penulisan

1. BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini memaparkan hal yang melatar belakangi suatu penelitian, identifikasi masalah, tujuan adanya penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, definisi operasional dan penyusunan penulisan skripsi.

2. BAB II Landasan Teori

Dalam bab ini tentang kerangka teori yang membahas variabel atau sub variabel pertama, variabel atau sub variabel kedua dan seterusnya. Kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

3. BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini tentang pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel, dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data, dan instrument penelitian yang digunakan untuk memperoleh suatu data penelitian, serta teknik analisis data.

4. BAB IV Hasil Penelitian

Dalam bab ini tentang memaparkan hasil penelitian berupa deskripsi data dari masing – masing variabel dan pengujian hipotesis dan temuan penelitian.

5. BAB V Pembahasan

Dalam bab ini tentang pembahasan yang berkaitan dengan hasil penelitian.

6. BAB VI Penutup

Dalam bab ini tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN